

BAB I

PENDAHULUAN

Pengejaran pertumbuhan merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara didunia dewasa ini, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai negara berkembang dan anggota ASEAN, Indonesia mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dibandingkan dengan anggota-anggota ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Salah satu penyebab rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kelangkaan modal dan untuk memperoleh modal, pemerintah berusaha menarik pihak-pihak asing untuk mengalihkan dan mengembangkan usaha ke Indonesia.

Bengkulu merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 1968, terletak di bagian Pulau Barat Sumatera, yang terkenal dengan sebutan Bengcoolen adalah tempat tumbuhnya bunga *Rafflesia Arnoldi* yang merupakan bunga terbesar di dunia. Propinsi Bengkulu memiliki Pesona Budaya Daerah dan Keindahan alamnya yang khas, hutan yang menghijau dari utara hingga selatan, diperkaya akan potensi alam yang besar baik itu mineral, bahan tambang, perkebunan, pertanian, perikanan dan pariwisata.

Namun kondisi investasi asing di Propinsi Bengkulu sebelum era otonomi daerah cenderung menurun dan memprihatinkan bila dibandingkan dengan setelah era otonomi daerah mengalami peningkatan tetapi belum signifikan, di Sumatera terdapat beberapa propinsi, salah satunya Propinsi

Bengkulu termasuk Propinsi yang paling sedikit investasi asingnya dan sampai saat ini masih belum banyak diketahui masyarakat luas/investor baik dalam negeri (PMDN) maupun investor luar negeri (PMA).

Menurunnya investasi asing ini berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah di Propinsi Bengkulu yang semakin menurun. Fakta dan data menunjukkan dengan jelas sebelum dan setelah era otonomi daerah dari tahun 1998-2006 mengalami peningkatan investasi asing di Propinsi Bengkulu tetapi belum signifikan, yang ada hanya investor lama yang masih berinvestasi untuk memelihara asetnya yang sudah diinvestasikan di Propinsi Bengkulu. Berbagai upaya dan usaha sebenarnya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Kota/Kabupaten maupun Propinsi untuk menarik minat para investor agar mau menanamkan modalnya di Bengkulu.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan suatu bangsa khususnya pembangunan ekonomi sebagai titik beratnya harus mengacu pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kegiatan investasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menciptakan sarana dan prasarana dalam pembangunan sehingga pemerintah selalu berusaha menarik pengusaha asing guna menanamkan modalnya agar ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan investasi. Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan perubahan-perubahan sistem di berbagai bidang dan meningkatkan sumber daya manusia demi tercapainya tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk menciptakan stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan salah

satu penyebab rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kelangkaan modal. Dan untuk memperoleh modal, pemerintah berusaha menarik pihak-pihak asing untuk mengalihkan dan mengembangkan usahanya ke Indonesia. Modal merupakan faktor utama dalam pelaksanaan pembangunan. Masalah kelangkaan modal banyak dihadapi oleh Negara-negara berkembang dalam pelaksanaan pembangunan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang juga menjadi karakteristik atau ciri-ciri umum dari setiap Negara berkembang, antara lain¹: 1. Standar hidup yang relatif rendah, sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan pendapatan yang parah, kurang memadainya pelayanan kesehatan dan pendidikan, 2. Tingkat produktivitas yang rendah, 3. Tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi, 4. Angka pengangguran, terbuka maupun terselubung, yang sangat tinggi dan akan terus bertambah tinggi, sementara penyediaan lapangan kerja semakin terbatas, 5. Ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada sektor produksi pertanian serta ekspor produk-produk primer (bahan-bahan mentah), 6. Pasar tidak sempurna dan informasi yang tersedia pun sangat terbatas, 7. Dominasi, ketergantungan, kerapuhan yang parah pada hampir semua aspek hubungan internasional. Beberapa faktor tersebut tak bisa dihindari, Indonesia pun mengalami hal-hal tersebut.

Untuk mengatasi kekurangan modal pembangunan, yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan karakteristik diatas menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sumber luar negeri berperan mengatasi kekurangan

¹ Michael P.Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jakarta, Erlangga, 1998, Hal. 45-46

tabungan (sebagai sumber modal). Adapun bentuk-bentuk dari penanaman modal asing antara lain investasi asing secara langsung (foreign direct investment), investasi tidak langsung berbentuk portofolio, serta kredit impor². Dari bentuk-bentuk ini yang menonjol adalah investasi secara langsung (foreign direct investment) baik yang bersifat penuh maupun patungan (joint venture) dengan kekuatan ekonomi domestik. Investasi asing ini merupakan sumber-sumber baru yang dibutuhkan oleh Negara berkembang dalam membangun masa depannya³.

Sebelum adanya pemberlakuan otonomi daerah kondisi investasi asing di Propinsi Bengkulu tidak mengalami peningkatan yang signifikan, berdasarkan Pendapatan Daerah Bengkulu di tahun 1998-1999 sebesar Rp. 3.707.019.822, di tahun 2000 Pendapatan Daerah menurun menjadi Rp.3.024.705.743. sedangkan di tahun 2006 Pendapatan Daerah meningkat sebesar Rp. 17,5 miliar, bila dilihat dari PDRB di Bengkulu di tahun 2000 sebelum otonomi daerah sebesar 3.116.411 dan PDRB tahun 2006 setelah otonomi daerah sebesar Rp.4.215.753⁴. Investasi asing sebelum otonomi daerah hanya ada 2 proyek PMA di tahun 1999 yang berasal dari Korea dengan investasi sebesar 13.967.000 juta, yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu dengan realisasi lahan 6 Ha dan di bidang kelapa sawit terpadu, kakao, karet dengan realisasi lahan 2500 Ha⁵. Pemerintah Daerah belum memiliki kebebasan dalam bertindak seluas-luasnya untuk menjadikan daerah

² Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah dan Hubungan: Studi Mengenai Otonomi, Demokratisasi, Globalisasi dan investasi*, Yogyakarta, 2001, hal.115

³ Steven J.Rusen dan Walter S.Jones, *The Logic of International Relations inc*, Massachussets,1980, hal.150

⁴ Badan Pusat Statistik Propinsi Bengkulu, *Propinsi Bengkulu Dalam Angka*, 2007, hal. 399

⁵ Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Propinsi Bengkulu, Daftar Perusahaan PMA/PMDN yang Aktif di Propinsi Bengkulu Tahun 2002-2006, Bab II hal. 2-6

sebagai daerah otonom. Semua kegiatan lebih banyak diserahkan langsung ke pusat, dengan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah atas kewenangan penanaman modal diharapkan lebih meningkatkan pelayanan kepada publik dan sekaligus memperkuat kemampuan daerah dan nasional untuk menghadapi era globalisasi juga memberikan kemudahan dalam dunia usaha dan penanaman modal.

Kebijakan otonomi daerah yang berlaku tanggal 1 januari 2001 diharapkan akan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Kebijaksanaan otonomi daerah tersebut diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Guna mendukung kedua undang-undang tersebut, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan pemerintah tambahan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tentang otonomi daerah. Dalam konteks ini, sedikitnya terdapat tiga buah peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan. Sejauh ini kedua undang-undang tersebut secara pokok memberikan sebuah kebebasan bertindak seluas-luasnya kepada daerah namun tetap dalam kerangka otonomi daerah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan dan pemerintahan atas wilayahnya secara mandiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat daerah tersebut sesuai dengan kondisi dan potensi daerahnya masing-masing. Keberadaan kedua undang-undang tersebut dapat dipandang sebagai dampak positif dari proses reformasi yang bergulir sejak terjadinya krisis ekonomi yang menandai adanya perubahan

paradigma, yaitu perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi.

Tujuan utama dari Undang-Undang No.22 Tahun 1999 adalah untuk meletakkan dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah melalui pemberian keleluasaan kebebasan bertindak kepada daerah untuk menjadi sebuah daerah yang otonom dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan otonomi daerah secara luas didasarkan pada prinsip demokrasi, tanggung jawab, partisipasi masyarakat, kesetaraan dan keadilan serta pertimbangan atas potensi dan diversifikasi daerah. Sementara tujuan utama Undang-Undang No.25 Tahun 1999 adalah untuk secara efektif meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, untuk menciptakan sebuah sistem keuangan daerah yang adil dan realisasi sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten akan memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan identifikasi, perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah mereka. Dengan demikian, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten harus siap menyiapkan program pembangunannya secara konseptual dan operasional. Menyadari kedudukan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten sebagai basis pembangunan negara berdaulat, hal demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan otonomi daerah akan banyak tergantung pada seberapa jauh partisipasi pemerintah kota dan pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan di wilayah mereka. Itu berarti bahwa masyarakat kota dan kabupaten tersebut harus diberikan kepercayaan dan

kewenangan yang cukup untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan sumber daya setempat. Otonomi daerah diharapkan lebih menopang negara kesatuan agar dapat berperan dalam era globalisasi dan memberi kemudahan dalam dunia usaha dan penanaman modal.

Pemberlakuan undang-undang otonomi daerah yang sedang bergulir di Indonesia sepertinya belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah propinsi Bengkulu dalam meningkatkan investasi asing. Ada kecenderungan yang mengkhawatirkan berbagai pihak bahwa pemerintah daerah sering kali merusak tatanan yang sudah ada. Apa yang sudah disepakati sebelumnya baik melalui "kontrak" dalam negeri atau dengan pihak asing sering kali diancam untuk ditinjau kembali yang dengan alasan otonomi daerah. Kalangan pengusaha asing dan domestik sering kali merasa terganggu dengan sikap politisi dan birokrasi lokal yang mencoba mengutak-atik apa yang sudah disepakati sebelumnya. Padahal dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah diharapkan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus memperkuat kemampuan daerah dan nasional untuk menghadapi era globalisasi.

Pertumbuhan investasi asing di Propinsi Bengkulu setelah otonomi daerah, beberapa tahun belakangan ini dari Tahun 2002-2006 mengalami peningkatan tetapi belum signifikan. Di Propinsi Bengkulu Proyek PMA dari Tahun 2002-2003 tidak ada investasi asing (PMA) hanya ada 1 di Tahun 2004 dengan investasi sebesar US\$ 1,4 Juta tetapi meningkat di Tahun 2005 PMA ada 3 proyek dengan investasi sebesar US\$ 12,1 Juta tetapi justru kembali menurun di

Tahun 2006 tidak ada proyek dan investasi PMA, adapun Rata-rata Perkembangan Investasi PMA Tahun 2002-2006 ada 1 proyek dengan investasi sebesar US\$ 5,8 Juta, sedangkan beberapa propinsi yang ada di Sumatera seperti Bangka Belitung yang merupakan propinsi baru di Sumatera lebih maju dibandingkan dengan propinsi Bengkulu Rata-rata Perkembangan Investasi PMA di Tahun 2002-2006 ada 4 proyek dengan investasi sebesar US\$ 28,5 Juta sedangkan di Kepulauan Riau merupakan propinsi yang paling banyak diminati oleh para investor asing dengan Rata-rata Perkembangan Investasi PMA di Tahun 2002-2006 ada 65 proyek dengan investasi sebesar US\$ 379,2 Juta⁶.

Pengembangan investasi yang belum berbasis pada kemampuan penguasaan teknologi dan masih relatif rendahnya kemampuan SDM tenaga kerjanya mengakibatkan implikasi yang tidak ringan bagi pertumbuhan iklim investasi di Propinsi Bengkulu. Rencana Strategis (RENSTRA) kegiatan pembangunan pada BKPM Propinsi Bengkulu ditingkatkan pelaksanaan kegiatan adalah kegiatan Prioritas Pembangunan yang memperhatikan Sumber Alam, Sumber Daya Manusia yang berwawasan lingkungan dengan penjabaran kebijakan program pembangunan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran, maka rencana implementasi strategi secara efektif dan efisien dilaksanakan secara berkesinambungan pada setiap tahun anggaran pembangunan⁷.

⁶ Sumber Laporan Tahunan Perkembangan Penanaman Modal, BKPM, 2006. Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMDN dan PMA Wilayah I (Propinsi NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau), Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal*, Jakarta, mei 2006, hal. 2-6

⁷ Dra.Hj.Suryati.M.Rivai, *Rencana Strategis (RENSTRA) BKPM Propinsi Bengkulu*, Bengkulu, februari 2004, hal. 1-4

B. TUJUAN PENULISAN

Dalam penulisan ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Daerah Bengkulu dalam meningkatkan investasi asing di era otonomi daerah dan akibat atau implikasi yang timbul sebagai akibat dari investasi asing, Promosi investasi dalam dan luar negeri dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Adanya hubungan internasional yaitu terciptanya kerjasama internasional oleh beberapa negara yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Menggambarkan upaya para investor dalam menanamkan modalnya dan hambatan-hambatan dalam meningkatkan investasi asing.

Selain itu tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan program S1 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan penulisan skripsi ini ditujukan pula sebagai perwujudan teori-teori yang penulis terima selama dibangku kuliah yang berhubungan dengan mata kuliah yang pernah saya dapatkan yaitu ekonomi politik internasional, politik luar negeri, perdagangan internasional, hukum internasional, dan hubungan internasional juga untuk menambah bahan bacaan bagi mereka yang berminat mengetahui tentang bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan investasi asing yang bisa meningkatkan perekonomian dan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat setempat juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semoga tujuan penulisan skripsi ini dapat tercapai sesuai harapan. Karena pada hakekatnya manusia hanya mampu berusaha dan berencana untuk mencapai tujuannya, sedangkan Allah sendiri yang menentukan ya atau tidak tercapainya usaha pencapaian tujuan itu.

C. POKOK PERMASALAHAN

Diberlakukannya undang-undang otonomi daerah sekarang ini diharapkan akan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah sehingga bisa tercipta kemakmuran dan kesejahteraan terhadap masyarakat Bengkulu karena di daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki, serta mempunyai kewenangan yang memadai untuk menggali sumber daya keuangan sendiri dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah. Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah: *“Bagaimana strategi Pemerintah Daerah Bengkulu dalam meningkatkan investasi asing di era otonomi daerah?”*

D. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis memerlukan kerangka dasar pemikiran. Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, Penulis menggunakan Hubungan Transnasional, Analisis Swot dan Teori Penanaman Modal, untuk melihat strategi Propinsi Bengkulu dalam meningkatkan investasi asing di era otonomi daerah.

1. HUBUNGAN TRANSNASIONAL

Konstelasi hubungan antar negara dalam percaturan internasional era sekarang telah berubah dari pandangan isu "state centric" yang memusatkan pada masalah kekuasaan dan keamanan ke isu-isu ekonomi yang lebih menguntungkan. Peran negara sebagai pelaku dalam politik dunia tidak lagi dominan karena terlibatnya aktor non negara yang kian eksis didalamnya. Pandangan ini didasarkan pada pengamatan semakin meningkatnya kepekaan dan kerentanan negara-negara dan aktor-aktor non negara terhadap interpedensi ekonomi⁸. Hubungan ekonomi internasional semakin menjadi peka terhadap ekonomi dalam negeri dan sebaliknya ekonomi dalam negeri kian peka pula terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam ekonomi internasional. Kondisi yang demikian itu menuntut negara-negara didunia mengubah pola politik luar negerinya dengan jalan menjalin hubungan kerjasama internasional ini cenderung lebih mengedepankan hubungan ekonomi ketimbang hubungan yang mengarah kepada penghimpunan kekuasaan.

Kerjasama tersebut telah meluas dan tidak sebatas hanya antara pemerintah negara saja tetapi juga melibatkan aktor-aktor non negara. Dengan melemahnya dan bergesernya peranan aktor negara oleh aktor non negara maka warna interaksi antar negara bukan lagi merupakan hubungan internasional melainkan sebagai hubungan transnasional.

⁸ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Displin dan metodologi*, Penerbit LP3ES, jakarta, 1994, hal. 232

Menurut Richard Falk mendefinisikan, "hubungan transnasional adalah perpindahan barang, informasi dan gagasan melintasi batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan secara langsung oleh aktor-aktor pemerintah"⁹. Dari definisi tersebut dapatlah dikemukakan bahwa konsep hubungan transnasional ini akan mengurangi makna penting kedaulatan dan merupakan bentuk pola kerjasama internasional yang didalamnya peranan aktor negara tidak lagi dominan dan digeser oleh peranan aktor non negara yang tidak memperhatikan batas-batas wilayah geografis yang memisahkan bangsa-bangsa.

Menurut Mochtar Mas'ued aktor non negara dalam hubungan kerjasama internasional ini bisa berwujud kelompok-kelompok suku, etnis atau separatis di dalam negara, berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan-perusahaan multinasional bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah¹⁰. Dalam pelaksanaannya hubungan transnasional ini seringkali tanpa sepengetahuan pihak pimpinan negara yang terlibat, bagian-bagian dari birokrasi pemerintah suatu negara bertindak sendiri, berinteraksi langsung dengan bagian-bagian serupa dari birokrasi pemerintah negara lain. Hal itu terjadi karena pandangan terhadap isu-isu sentral dalam interaksi internasional sudah berubah.

Pola hubungan transnasional ini melibatkan partisipasi yang lebih besar dari berbagai jenis aktor non negara, terutama dari organisasi non pemerintah, organisasi internasional maupun perusahaan transnasional, dan tidak menutup kemungkinan akan muncul aktor baru.

⁹ Richard Falk, *A Study Of Future World*, dalam bukunya Mochtar Mas'ued, *Ibid*, hal.231

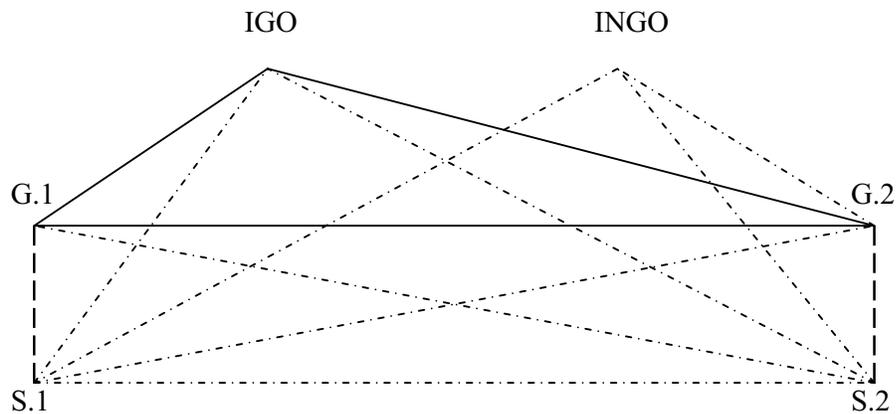
¹⁰ Mochtar Mas'ued, *Ibid*, hal 231

Kerjasama Propinsi Bengkulu merupakan kerjasama internasional yang dilakukan oleh aktor non negara yaitu aktor yang merupakan bagian-bagian dari birokrasi Pemerintah Pusat bisa berupa pemerintah kota atau negara bagian, propinsi dan juga kabupaten yang telah diberi wewenang atau hak otonomi sebagai bagian dari birokrasi Pemerintah Pusat.

Bagan pola interaksi hubungan transnasional dan politik antar negara dapat digambarkan dalam bagan gambar berikut ini.

Gambar 1.1

Interaksi Transnasional dan Politik Antarnegara



Sumber: Adaptasi dari R.O Keohane dan JS Nye, *Transnational Relation and World Politic*,(dalam Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional: Displin dan Metodologi*, Jakarta:LP3ES, 1990), hal.232.

Keterangan :

- = politik antar negara klasik
- = politik dalam negeri
- = interaksi transnasional
- G = pemerintah
- S = masyarakat
- IGO = organisasi antar pemerintah
- INGO = organisasi antar non pemerintah

Dalam gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa hubungan internasional tidak hanya terjadi dalam lingkup negara saja (garis lurus) namun juga dari organisasi non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan masyarakat pun dapat juga berinteraksi dengan masyarakat negara lain (garis putus titik). Organisasi pemerintah maupun non pemerintah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat negara lain tanpa melalui perantara pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan hubungan tersebut dapatlah diketahui bahwa pola hubungan internasional seperti digambarkan dalam bagan di atas memungkinkan banyak berperannya aktor non negara. artinya masyarakat dari suatu negara bisa melakukan hubungan internasional dengan masyarakat dari negara lain, dan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dari suatu negara melalui perantara Pemerintah Pusat.

Dengan mengambil contoh beberapa kerjasama transnasional yang diwujudkan dengan masuknya beberapa perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Propinsi Bengkulu sebagai aktor non negara (INGO) yang termasuk diantaranya yaitu China dengan Perusahaan PT Fine Wealthy Indonesia di tahun 2005 melakukan kerjasama dalam bidang usaha industri pengolahan pasir besi dan jasa konsultasi bidang pertambangan berlokasi di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, dengan rencana investasi sebesar US\$ 815.000 terdapat di lampiran 19. selain itu juga dengan negara Malaysia dengan Perusahaan PT Indo MewahMas di

tahun 2005 melakukan kerjasama dalam bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit berlokasi di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, dengan rencana investasi sebesar US\$ 8.630.000,00¹¹ terdapat di lampiran 18. Selanjutnya Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM) sebagai unsur Pemerintah Pusat (G1) dan setelah itu diteruskan ke BKPM dalam hal ini BKPM Bengkulu, dalam kedudukannya sebagai Local Government (LG), yaitu Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu. Karena Propinsi Bengkulu merupakan salah satu mitra strategis dari Kerjasama Sub Ekonomi Regional (KSER).

Dengan adanya kerjasama ini Propinsi Bengkulu semakin meningkat investasi asingnya tetapi belum signifikan. Dari pola skema gambar tersebut di atas dapat diketahui bahwa secara kewenangan Pemerintah Indonesia berperan sebagai fasilitator dan Pemerintah Daerah Bengkulu menjadi implementator proyek kegiatan hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan asing.

Untuk dapat mengetahui visi misi setiap daerah, tentunya memerlukan bantuan dari pihak lain yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Namun, sebelum ada otonomi daerah, setiap daerah yang ingin melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar negeri sering terkendala akibat tidak mempunyai kewenangan untuk berhubungan/bekerjasama dengan negara lain karena hubungan luar negeri masih menjadi wewenang pemerintah pusat. Oleh karena itu, kemudian pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang yang berisi tentang otonomi daerah yang didalamnya memuat kewenangan daerah untuk melakukan hubungan luar negeri/kerjasama luar negeri yang dapat dimanfaatkan untuk

¹¹ <http://www.Kompas.cybermedia.com>. Akses Pada Tanggal 11 Februari 2009

mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada sehingga dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat serta bertujuan untuk dapat mencapai visi misi daerah tersebut.

Dengan adanya otonomi daerah, aktor hubungan internasional tidak hanya negara namun juga propinsi dan kabupaten/kota. Hal ini mempunyai implikasi terhadap pola hubungan internasional yaitu pemerintah pusat dalam hal ini BKPM RI menempatkan aparaturnya di setiap propinsi. Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat membentuk bidang/bagian yang mengurus hubungan/kerjasama luar negeri secara otonom.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti perintah. Otonomi bermakna memerintah sendiri. Sedangkan otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku¹². Meskipun sebagian wewenang pusat dilimpahkan ke daerah namun kedaulatan, politik luar negeri, mata uang, hukum dan Undang-Undang tetap menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Namun demikian, meskipun politik luar negeri masih menjadi wilayah Pemerintah Pusat, adanya tekanan diplomasi dan arah kebijakan luar negeri akan diikuti oleh unsur-unsur kepentingan nasional dan daerah, dimana hubungan ekonomi internasional menjadi semakin peka terhadap ekonomi dalam negeri. Seperti yang dikatakan oleh pendukung hubungan transnasionalis, yang

¹² Sarundajang, "Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah," dalam Nugraho D Riant, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000),42.

tetapi juga aktor-aktor lain non negara, termasuk organisasi pemerintah/non pemerintah dalam negeri maupun internasional yang fokus perhatiannya bukan semata-mata pada masalah militer dan keamanan, tetapi juga kepada isu ekonomi.

Dengan demikian, adanya otonomi daerah telah memungkinkan suatu daerah Propinsi atau Kabupaten atau Kota untuk dapat mengadakan hubungan luar negeri yang pada dasarnya sesuai dengan kerangka hubungan transnasional. Kerjasama Investasi Asing yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat dikategorikan sebagai gagasan yang melewati lintas batas negara tanpa dikendalikan oleh pusat, sehingga Propinsi Bengkulu dapat dikategorikan dalam kerangka hubungan transnasional tersebut.

Dalam sistem internasional, khususnya dalam kehidupan bernegara, tentunya sebuah negara tidak dapat terlepas dari negara lain. Kepentingan dasar negara untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain adalah merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditawar-tawar. Dalam memenuhi kebutuhannya, setiap negara tentu harus mengadakan hubungan dengan negara lain yang diwujudkan dalam suatu bentuk kerjasama.

Menurut K.J. Holsti, pendefinisian Kerjasama Internasional adalah sebagian besar transaksi atau interaksi negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyak kasus yang terjadi sehingga pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, berbagai perjanjian yang memuaskan semua pihak ini yang disebut dengan kerjasama¹⁵.

Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda. Sebagian besar transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung diantara dua negara yang

¹⁵ K.J. Holsti, *Politik Internasional Studi Analisis HI*.(Jakarta: Erlangga, 1998), hal. 89.

menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama¹⁶. Kerjasama dapat terjalin dalam berbagai bidang yaitu bidang ekonomi, sosial budaya, politik, maupun pertahanan keamanan.

Demikian juga bagi negara Indonesia, kerjasama dengan negara lain sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memecahkan permasalahan sekaligus memenuhi kebutuhannya. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya kiprah Indonesia di dunia Internasional, baik oleh pemerintah maupun aktor-aktor non pemerintah, sehingga membawa implikasi perlu ditingkatkannya peran dari masing-masing pelaku hubungan internasional tersebut.

Propinsi Bengkulu dalam hal ini sebagai salah satu propinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diberi kewenangan untuk dapat bekerjasama dengan daerah lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, tentunya dengan menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, agar dapat memecahkan permasalahan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Salah satu kerjasama antara Propinsi Bengkulu dengan Propinsi lain di luar negeri diantaranya adalah dengan beberapa negara. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk kerjasama sub ekonomi Regional dan Regional Sumatera. Kerjasama ini didasari oleh berbagai kepentingan bersama diantara keduanya yaitu antara lain dalam beberapa sektor diantaranya perkebunan, pertanian, pertambangan, pariwisata, peternakan, diharapkan dapat meningkatkan promosi luar negeri, dapat memberi peluang kepada investor asing dengan negara lain untuk memasarkan produknya dan menarik masuknya investor tersebut ke

¹⁶ K.J. Holsti, *Politik Internasional Untuk Analisis*, edisi keempat, jilid kedua, alih bahasa: M.Tahir Azhary.(Jakarta: Erlangga, 1998),hal. 210.

Propinsi Bengkulu, dalam bidang pertanian dapat dilakukan kerjasama dan alih teknologi, dalam bidang perdagangan dapat meningkatkan ekspor impor antar masyarakat internasional sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian kedua belah pihak yang semakin membaik.

2. ANALISIS SWOT

Analisis Swot adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan penegembangan misi, tujuan dan kebijakan¹⁷. Dengan demikian perencanaan strategis (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis yang dalam hal ini berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam kondisi yang ada saat ini.

Analisis Swot menunjukkan bahwa suatu kinerja dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Swot adalah singkatan dari lingkungan internal *strengths* dan *Weakness* serta lingkungan eksternal *Opportunities* dan *Threats* yang dihadapi dunia bisnis¹⁸. Analisis Swot membandingkan antara faktor eksternal peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*Weakness*).

Konsep dasar pendekatan Swot ini, tampaknya sederhana sekali yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Sun Tzu (Sun Tzu: 1992), bahwa "apabila kita

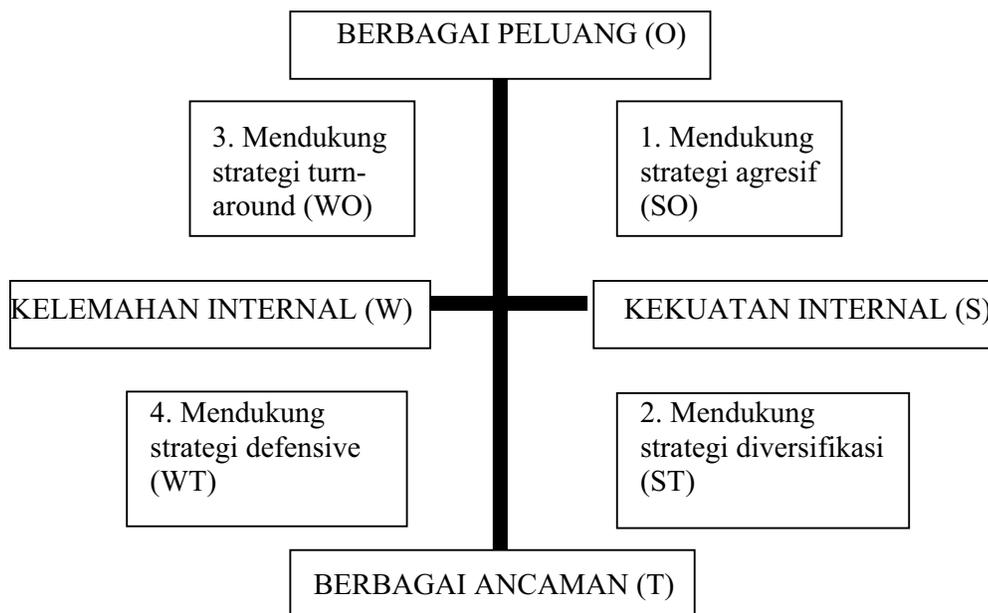
¹⁷ Freddy Rangkuti, *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Edisi Pertama, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 18-19

¹⁸ *Ibid.*, hal. 19

telah mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dan mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan, sudah dapat dipastikan bahwa kita akan dapat memenangkan pertempuran”¹⁹.

¹⁹ *Ibid.*, hal.20

Gambar 1.3
Analisis SWOT



Sumber: Gambar diagram 1 Analisa SWOT diatas telah termodifikasi oleh penulis dengan melakukan sedikit penambahan-penambahan yang diharapkan akan dapat sedikit membantu untuk memahami struktur SWOT yang lebih mudah. Untuk melihat bentuk asli diagram dari analisa SWOT bisa dilihat dalam bukunya **Freddy Rangkti**, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Edisi Pertama, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000. hal.19

Keterangan :

- Prinsip utama Swot adalah bagaimana strategi kita dalam memaksimalkan kekuatan (S) dan peluang (O)? Selain itu di sisi lain kita juga dituntut untuk membuat strategi dalam meminimalkan kelemahan (W) dan ancaman (T).

- Karakteristik strategi yang digunakan:
 - A. Strategi SO : Strategi menggunakan kekuatan internal untuk meraih peluang-peluang sebesar-besarnya yang ada di luar (*agresif*).
 - B. Strategi ST : Strategi menggunakan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman yang datangnya dari luar (*diversifikasi*).
 - C. Strategi WO : Strategi mengurangi kelemahan-kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang yang ada diluar (*peninjauan kembali*).
 - D. Strategi WT : Strategi mengurangi kelemahan-kelemahan internal dan menghindari ancaman yang ada diluar (*defensif*).

Analisis ini dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada di Propinsi Bengkulu dalam menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut dan kemudian dapat digunakan juga untuk melihat kesempatan yang terbuka bagi daerah untuk bersaing dengan negara-negara lain atau daerah lain dalam hal mengundang pihak-pihak investor agar menanamkan modalnya di daerah. Kemudian analisis ini juga dapat memberikan rujukan kepada pemerintah daerah untuk ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan yang akan dihadapinya dengan pesaing-pesaing yang lain. Untuk dapat memenangkan persaingan dengan pesaing-pesaing lainnya, maka suatu daerah

harus dapat menyusun rencana strategis agar dapat memenangkan persaingan tersebut.

3. TEORI PENANAMAN MODAL

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam kaitannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhi masuknya modal asing atau investasi asing di suatu Negara. Menurut teori Alan M. Rugman, ada dua faktor terpenting yang mempengaruhi penanaman modal asing yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi²⁰. *Pertama*, Variabel Lingkungan. Variabel Lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik Negara atau faktor spesifik lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu: ekonomi, non-ekonomi dan modal pemerintah. Variable ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja, modal (dana), teknologi, dan tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen yang disebut human capital²¹. Adapun variabel non ekonomi yang memotivasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, hukum dan sosial budaya yang melekat pada suatu Negara. Ada beberapa pengamat yang juga memasukkan faktor pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada suatu negara (*clean government and good governance*) baik tuan rumah (*host country*) ataupun pemerintah asal penanam modal itu. Selain itu sikap pemerintah yang lebih terbuka dengan segala kebijakannya yang tidak memberatkan para investor asing yang ingin

²⁰ Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001), hal 78

²¹ Ibid., hal. 79.

menanamkan modalnya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam penanaman modal di suatu lokasi. *Kedua*, Variabel Internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan. Ini merupakan variabel perusahaan yang kadang juga disebut sebagai faktor spesifik pemilikan²².

Dalam Teori Penanaman Modal yang dikemukakan oleh Alan M. Rugman menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Dalam hal ini Bengkulu secara umum sebagai tuan rumah (*host country*) harus memperhatikan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penanaman modal asing diantaranya adalah variabel lingkungan.

Jadi dengan adanya teori penanaman modal Pemerintah daerah Bengkulu diharapkan bisa mengetahui bagaimana cara berinvestasi yang menguntungkan kedua belah pihak, Propinsi Bengkulu berupaya untuk mencari ciri khas yang membedakan dengan propinsi lain serta upaya meningkatkan daya saing iklim investasi, dan bagaimana cara meningkatkan investor asing yang mau menanamkan modalnya di suatu negara.

²² Alan M. Rugman, *Bisnis Internasional 1* (Jakarta: PT. Intermedia, 1993), hal 147

E. HIPOTESA

Dengan melihat permasalahan yang telah diuraikan diatas dan didukung oleh teori-teori yang dianggap dapat membantu analisa maka penulis mengajukan hipotesa sebagai berikut: Strategi Propinsi Bengkulu dalam meningkatkan Investasi asing di Era Otonomi Daerah adalah:

1. Meningkatkan daya saing iklim investasi
2. Mengadakan promosi investasi dalam dan luar negeri
3. Mengadakan kerjasama internasional
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

F. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksplorasi dengan studi literature. Metode yang bersifat eksplorasi deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena realitas. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Dalam penyajian data, penulis menggunakan studi literature dalam pengambilan data dari berbagai sumber seperti buku-buku, laporan riset, koran, situs-situs internet serta berbagai media lainnya yang terkait untuk mendukung penelitian.

G. BATASAN PENELITIAN

Pembatasan ruang lingkup penelitian diperlukan untuk mempersempit fokus penelitian sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan tidak terlalu meluas pembahasannya. Penulis membatasi penelitian ini dalam konteks sebelum dan sesudah Era Otonomi Daerah di Propinsi Bengkulu Sejak Tahun 1998-2006.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan disusun ke dalam lima bab, yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab I: Berisi Pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, tujuan penulisan, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Memaparkan tentang kondisi umum Propinsi Bengkulu yang didalamnya akan membahas posisi geografis, potensi daerah, visi dan misi pembangunan di Propinsi Bengkulu, juga kondisi investasi asing di Propinsi Bengkulu sebelum dan sesudah era otonomi daerah. Kemudian dalam bab ini juga akan dipaparkan sedikit tentang landasan hukum investasi dan masalah-masalah substansi Undang-Undang Otonomi Daerah yang sedang berlaku saat ini.

Bab III: Di bab ini akan membahas peluang-peluang investasi, Pembahasan dalam bab ini akan sedikit melihat peluang investasi, serta ancaman

apa saja yang akan dapat mendorong atau menghambat investor asing untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan di Propinsi Bengkulu di era otonomi daerah. Di bab ini penulis juga akan membahas hambatan-hambatan yang dihadapi investor dan Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu.

Bab IV: Akan membahas bagaimana strategi Propinsi Bengkulu dalam meningkatkan investasi asing untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Propinsi Bengkulu di Era Otonomi Daerah yaitu dengan Meningkatkan daya saing iklim investasi, Mengadakan promosi investasi dalam dan luar negeri, Mengadakan kerjasama internasional, dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bab V: Kesimpulan dan Penutup.